

RENJA 2022

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia Nya sehingga Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 dapat tersusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolak ukur) kinerja kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, maka diharapkan dapat dijadikan dasar penyusunan anggaran oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna untuk Tahun 2022 dan melalui dokumen ini pula para pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi secara transparan.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam adanya perencanaan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022.

Ranai, 15 Juli 2021

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	18
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	21
3.2. Tujuan dan Sasaran.....	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan.....	29
BAB V PENUTUP.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Tahun 2019 dan 2020.....	11
Tabel 2.2	: Capaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.....	14
Tabel 3.1	: Tujuan dan Sasaran Tahun 2022.....	27
Tabel 3.2	: Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2022 BP3D Kabupaten Natuna.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 48 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna, tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengendalian rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah juga menyusun rencana pembangunan di bidang sosial, budaya dan pemerintahan; perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan; melakukan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah; penelitian dan pengembangan; data dan analisis pembangunan; serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi keuangan, umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sosial, budaya dan pemerintahan;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi, SDA, infrastruktur, dan kewilayahan;
- d. perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
- e. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi penelitian dan pengembangan;

- f. pelaksanaan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu di bidang data dan analisis pembangunan;
- g. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- h. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- i. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;
- j. pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota;
- k. perumusan kebijakan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan kabupaten/kota; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan penjabaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memberikan gambaran tentang program, kegiatan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam satu tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mencakup :

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tentang pembentukan tim penyusun Renja;
- 2) Orientasi mengenai Renja;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi :

- 1) Perumusan Rancangan Renja, dan
- 2) Penyajian Rancangan Renja.

Perumusan rancangan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mencakup :

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;
- c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
- e) Perumusan tujuan dan sasaran;
- f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- g) Perumusan kegiatan prioritas;
- h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
- i) Penyempurnaan rancangan Renja;
- j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
- k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

3. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

4. Penetapan Renja SKPD

Pada tahap ini, rancangan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2019 - 2024. Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah diutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna;
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 66);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 30);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2022 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2022;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2022 sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2022, berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2022
- Bab V Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp.6.768.757.552,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.642.932.854,00 atau sebesar 83,37%, dan realisasi fisik sebesar 118,66%.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2020 dan capaian Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 4) Penyediaan alat tulis kantor
- 5) Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
- 6) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 8) Penyediaan makanan dan minuman
- 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 10) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
- 11) Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
- 2) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - 1) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
 - 2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - 1) Kursus dan peningkatan keterampilan aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- f. Program Pengembangan Data/ Informasi**
 - 1) Pengembangan Sistem Data dan Informasi Daerah
 - 2) Analisis Data Pembangunan Daerah
- g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - 1) Penyusunan Rancangan RKPD
 - 2) Revisi RPJPD
 - 3) Revisi RPJMD
 - 4) Penyelenggaraan musrenbang RKPD
 - 5) Penyusunan rencana kinerja tahunan daerah (RKTD)
 - 6) Penerapan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah
 - 7) Fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan desa
 - 8) Fasilitasi penyusunan Renstra
- h. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**
 - 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 - 2) Fasilitasi dan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan
 - 3) Fasilitasi Pelaksanaan RAD-PG
 - 4) Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah
- i. Program Perencanaan Sosial dan Budaya**
 - 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
 - 2) Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Pencapaian Target SDG's
 - 3) Fasilitasi dan Koordinasi Kabupaten / Kota Sehat
- j. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**
 - 1) Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur
 - 2) Fasilitasi Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pengembangan Wilayah
- k. Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - 1) Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

I. Program Pelaporan Pembangunan Daerah

- 1) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
- 2) Penyusunan Perjanjian Kinerja (Penja)

m. Program Penelitian dan Pengembangan

- 1) Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah
 - 2) Koordinasi dan Fasilitasi Kelitbangan
2. Program/ kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sbb :
- a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 - b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan yaitu sebagai berikut:
- a. Keluarnya kebijakan pemerintah secara nasional sebagaimana diamanatkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19). Menuntut daerah dapat menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 dan merasionalisasikan belanja dari komponen Belanja Barang Dan Jasa serta Belanja Modal paling sedikit sebesar 50% pada setiap Organisasi Perangkat Daerah
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Capaian renstra secara umum telah berjalan dengan baik, dengan capaian pada seluruh kegiatan telah mencapai 100 persen, bahkan sebagian diantaranya telah melebihi target kinerja maupun anggaran yang direncanakan dalam Renstra.
5. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2022 yaitu perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah s/d Tahun 2020 terlihat pada Tabel 2.1

Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Tahun 2019 dan 2020

Kode	Sasaran Pembangunan Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode renstra PD)		Realisasi capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2018		Target Kinerja Renja/ RKPD OPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja s.d Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2019 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2019 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2019		Perangkat Daerah
					5		6		7		I		II		III		IV		12 = 10		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.01.		PERENCANAAN																											
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi perkantoran	Bulan	60	9.461.900.000	24	4.191.056.089	12	2.441.377.930	12	2.441.377.930	3	335.722.072	6	678.479.946	9	1.332.710.120	12	2.248.576.253	12	2.248.576.253	100,00	92,10	36	6.439.632.342	60,00	68,06	
01.01.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	60	86.000.000	24	32.970.000	12	16.500.000	12	16.500.000	3	5.240.000	6	10.730.000	9	16.480.000	12	16.480.000	12	16.480.000	100,00	99,88	36	49.450.000	60,00	57,50	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
01.02.		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	60	840.000.000	24	253.006.895	12	141.000.000	12	141.000.000	3	1.809.000	6	4.847.000	9	67.720.500	12	131.542.500	12	131.542.500	100,00	93,29	36	384.549.395	60,00	45,78	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
01.08.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	60	42.000.000	24	16.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	3	2.000.000	6	4.000.000	9	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	100,00	100,00	36	24.000.000	60,00	57,14	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
01.10.		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	Bulan	60	410.000.000	24	147.730.000	12	75.000.000	12	75.000.000	3	15.000.000	6	34.800.000	9	57.706.000	12	74.706.000	12	74.706.000	100,00	99,61	36	222.436.000	60,00	54,25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
01.11.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	Bulan	60	400.000.000	24	186.993.825	12	80.000.000	12	80.000.000	3	6.960.000	6	26.153.600	9	51.231.600	12	76.477.600	12	76.477.600	100,00	95,60	36	263.471.425	60,00	65,87	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
01.13.		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	60	737.900.000	34	547.320.567	20	492.455.000	20	492.455.000	0	-	0	-	3	-	3	402.930.700	3	402.930.700	15,00	81,82	37	950.251.267	61,67	128,78	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
01.15.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	Bulan	60	350.000.000	24	69.461.000	12	42.000.000	12	42.000.000	3	9.000.000	6	17.950.000	9	27.000.000	12	41.450.000	12	41.450.000	100,00	98,69	36	110.911.000	60,00	31,69	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
01.17.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	Bulan	60	600.000.000	24	226.710.000	12	120.000.000	12	120.000.000	3	-	6	35.120.000	9	68.400.000	12	110.000.000	12	110.000.000	100,00	91,67	36	336.710.000	60,00	56,12	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
01.18.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	Kali	200	3.700.000.000	139	1.571.889.192	39	970.750.000	39	970.750.000	24	152.067.761	36	489.957.396	49	690.914.880	59	893.835.625	59	893.835.625	151,28	92,08	198	2.465.724.817	99,00	66,64	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
01.19.		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	Orang	16	1.806.000.000	16	985.285.066	16	381.180.930	16	381.180.930	17	96.084.711	17	190.800.750	17	281.135.940	17	380.232.828	17	380.232.828	106,25	99,75	16	1.365.517.894	100,00	75,61	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
01.20.		Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	Kali	55	490.000.000	34	153.689.544	7	114.492.000	7	114.492.000	12	47.560.600	21	64.121.200	31	64.121.200	49	112.921.000	49	112.921.000	700,00	98,63	83	266.610.544	150,91	54,41	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	75	1.035.000.000	62,44	217.259.800	70	124.000.000	70	124.000.000	62,44	12.092.950	62,44	40.054.000	63,11	56.651.800	63,11	109.924.350	63,11	109.924.350	90,16	88,65	63,11	327.184.150	84,15	31,61	
02.24.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas (operasional) yang dipelihara	Unit	10	601.000.000	20	128.369.800	11	78.000.000	11	78.000.000	0	3.792.950	0	20.219.000	11	34.066.800	11	64.009.350	11	64.009.350	100,00	82,06	31	192.379.150	310,00	32,01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
02.30.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	60	234.000.000	24	88.890.000	12	46.000.000	12	46.000.000	3	8.300.000	6	19.835.000	9	22.585.000	12	45.915.000	12	45.915.000	100,00	99,82	36	134.805.000	60,00	57,61	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
02.42.		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Gedung	1	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	95	360.000			90	7.500.000	90	7.500.000	90,00	-	90,00	-	90,00	-	90,00	90	7.500.000	100,00	100,00	90,00	7.500.000	94,74	####		
03.02.		Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Stel	65	360.000			65	7.500.000	65	7.500.000	0	-	0	-	0	-	65	7.500.000	65	7.500.000	100,00	100,00	65	7.500.000	100,00	2083,33	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
03.05.		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Satker	130	240.000			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	Persen	75	1.200.000.000	21,55	76.061.000	60	259.500.000	60	259.500.000	13,04	-	19,57	42.280.900	21,74	112.775.801	21,74	252.000.406	21,74	252.000.406	36,23	97,11	43,29	328.061.406	57,72	27,34	
05.04.		Kursus dan peningkatan keterampilan aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti kursus	Orang	75	1.200.000.000	5	76.061.000	15	259.500.000	15	259.500.000	0	-	3	42.280.900	10	112.775.801	20	252.000.406	20	252.000.406	133,33	97,11	25	328.061.406	33,33	27,34	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	Predikat/ Nilai	A / 80	425.000.000	80,34	37.138.100	88 / 77	29.110.000	78	29.110.000	80,34	-	80,34	14.457.300	83,54	15.557.300	83,54	15.557.300	83,54	15.557.300	107,10	53,44	83,54	52.695.400	104,43	12,40	

Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022

06.01.		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	15	425.000.000	6	37.138.100	3	29.110.000	3	29.110.000	2	-	3	14.457.300	3	15.557.300	3	15.557.300	3	15.557.300	100,00	53,44	9	52.695.400	60,00	12,40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
15		Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Tingkat Keterlaksanaan Data Dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Persen	50	4.529.038.000	26	1.912.705.760	35	625.496.000	40	625.496.000	60	117.393.200	60	189.162.400	60	487.924.900	60	602.221.333	60	602.221.333	150,00	96,28	26	2.514.927.093	52,00	55,53	
15.23.		Pengembangan sistem data dan informasi daerah	Jumlah sistem data	Sistem data	1	2.167.900.000	2	207.110.310	1	126.350.000	1	126.350.000	1	-	1	29.029.800	1	58.058.300	1	124.208.500	1	124.208.500	100,00	98,31	3	331.318.810	300,00	15,28	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
15.24.		Analisis Data Pembangunan Daerah	data pembangunan daerah	Jenis	25	2.361.138.000	10	1.155.204.450	5	499.146.000	5	499.146.000	0	117.393.200	0	160.132.600	3	429.866.600	5	478.012.833	5	478.012.833	100,00	95,77	15	1.633.217.283	60,00	69,17	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen RKPD yang Ditetapkan Dengan PERKA DA	Dokumen	5	1.663.718.000	4	522.087.336	2	290.955.000	2	290.955.000	0	66.712.000	1	121.409.929	2	167.533.311	2	239.790.458	2	239.790.458	100,00	82,41	6	761.877.794	120,00	47,51	
21.08.		Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah petub RKPD dan RKPD Perubahan	Perub	10	1.603.718.000	4	522.087.336	2	290.955.000	2	290.955.000	0	66.712.000	1	121.409.929	2	167.533.311	2	239.790.458	2	239.790.458	100,00	82,41	6	761.877.794	60,00	47,51	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak		17.675.741.000		2.831.137.429	Ada	1.828.995.000	Ada	1.828.995.000	Ada	-	Ada	24.039.104	Ada	408.611.062	Ada	1.530.906.347	Ada	1.530.906.347	100,00	83,70	Ada	4.362.043.776	Ada	24,68	
21.34.		Revisi RPJPD	Jumlah Rancangan RPJPD	Rancangan	1	1.065.295.000	0	-	1	1.065.295.000	1	1.065.295.000	0	-	0	-	0	-	1	906.405.136	1	906.405.136	100,00	85,08	1	906.405.136	100,00	85,08	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
21.35.		Revisi RPJMD	Jumlah Rancangan RPJMD	Rancangan	5	4.175.247.000	2	1.476.339.090	1	763.700.000	1	763.700.000	0	-	0	24.039.104	0	408.611.062	0	624.501.211	0	624.501.211	0,00	81,77	2	2.100.480.301	40,00	50,32	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
21	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	Persen	98,00	8.350.247.000	98,64	2.831.137.429	94	1.739.327.000	94	1.739.327.000	98,54	525.161.291	98,54	723.895.294	86,94	931.191.094	86,94	1.367.891.356	86,94	1.367.891.356	92,49	78,64	86,94	4.199.028.785	88,71	50,29	
21.09.		Penyenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah penyelenggaraan musrenbang RKPD	Penyelenggaraan	5	4.175.247.000	2	1.476.339.090	1	612.482.000	1	612.482.000	1	486.980.591	1	530.838.994	1	530.838.994	1	530.838.994	1	530.838.994	100,00	86,67	3	2.007.178.084	60,00	48,07	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
21.16.		Penyusunan rencana kinerja tahunan daerah (RKTD)	Jumlah Dokumen RKTD	Dokumen	5	975.000.000	3	156.283.864	1	90.100.000	1	90.100.000	0	-	0	400.000	1	8.766.400	1	49.695.830	1	49.695.830	100,00	55,16	4	205.959.694	80,00	21,13	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
21.31.		Penerapan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah	Aplikasi Simrenbang	Aplikasi	1	1.300.000.000	2	826.735.600	1	454.915.000	1	454.915.000	1	22.310.000	1	146.607.000	1	263.002.000	1	416.601.500	1	416.601.500	100,00	91,58	3	1.243.337.100	300,00	95,64	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
21.33.		Facilitas dan sinkronisasi perencanaan desa	Jumlah desa yang disinkronisasi dokumen RPJMDDes dan RKPDDes	Desa	70	1.900.000.000	114	371.778.875	30	277.080.000	30	277.080.000	0	15.870.700	0	45.065.300	0	65.605.300	70	223.388.532	70	223.388.532	233,33	80,62	184	595.167.407	262,86	31,32	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
21.38.		Facilitasi penyusunan Renstra	Jumlah SKPD yang difasilitasi	SKPD	45	304.750.000	-	-	44	304.750.000	44	304.750.000	0	-	0	984.000	0	62.978.400	45	147.366.500	45	147.366.500	102,27	48,36	45	147.366.500	100,00	48,36	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD bidang ekonomi	Persen	96,00	6.250.000.000	100	776.776.265	94	851.857.000	94	851.857.000	86,49	34.883.000	86,49	273.463.676	84,00	502.748.671	84,00	736.063.735	84,00	736.063.735	89,36	86,41	100	1.512.840.000	104,17	24,21	
22.04.		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	Koordinasi	90	1.900.000.000	49	317.018.140	15	335.270.000	15	335.270.000	20	28.043.000	38	143.040.876	43	197.636.676	60	315.762.970	60	315.762.970	400,00	94,18	109	632.781.110	121,11	33,30	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
22.09.		Facilitasi dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan	Jumlah laporan LP2KD	Laporan	5	1.100.000.000	1	45.812.525	1	118.000.000	1	118.000.000	0	-	0	31.512.000	0	100.380.395	1	104.831.395	1	104.831.395	100,00	88,84	2	150.643.920	40,00	13,69	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
22.13.		Facilitasi pelaksanaan RAD-PG	Jumlah Laporan	Laporan	4	1.350.000.000	0	-	1	122.514.000	1	122.514.000	0	-	0	34.489.800	0	67.084.800	1	71.503.800	1	71.503.800	100,00	58,36	1	71.503.800	25,00	5,30	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
22.14.		Facilitasi dan Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Jumlah produk unggulan daerah (PUD)	PUD	5	1.750.000.000	1	217.569.800	1	276.073.000	1	276.073.000	0	6.840.000	0	64.421.000	0	137.646.800	1	243.965.570	1	243.965.570	100,00	88,37	2	461.535.370	40,00	26,37	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
23		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD bidang Sosial budaya	Persen	88	4.450.000.000	100	1.303.662.826	78	1.081.411.000	80	1.081.411.000	95,9	98.411.859	95,9	239.883.047	93,41	326.256.380	93,41	687.649.623	93,41	687.649.623	116,76	63,59	100	1.991.312.449	113,64	44,75	
23.03.		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah koordinasi	Koordinasi	90	1.750.000.000	20	310.231.446	15	418.744.000	15	418.744.000	1	48.070.600	6	156.790.800	7	206.512.793	29	380.729.766	29	380.729.766	193,33	90,92	49	690.963.212	54,44	39,48	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
23.08.		Koordinasi, evaluasi dan monitoring pencapaian target SDG's	Persentase capaian Target indikator SDG's	Persen	40	1.250.000.000	20	90.287.764	20	171.280.000	20	171.280.000	0	-	10	16.191.788	11	18.391.788	16,5	18.391.788	17	18.391.788	82,50	10,74	37	108.679.552	91,25	8,69	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
23.09.		Facilitasi dan Koordinasi Kabupaten / Kota Sehat	Jumlah tatanan kabupaten/kota sehat yang sehat	Tatanan	6	1.450.000.000	4	777.878.406	4	491.387.000	4	491.387.000	2	50.341.259	2	66.900.459	2	101.351.799	2	288.528.069	2	288.528.069	50,00	58,72	6	1.066.406.475	100,00	73,55	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
24		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Persen	96,00	5.000.000.000	89,65	1.110.968.404	93	734.175.000	94	734.175.000	92,05	75.061.192	92,05	304.314.538	90,80	431.515.409	90,80	697.672.005	90,80	697.672.005	96,60	95,03	90,80	1.808.640.409	94,59	36,17	
24.04.		Facilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi	Koordinasi	115	1.650.000.000	29	383.759.963	12	304.244.000	12	304.244.000	7	34.944.900	13	135.100.729	13	178.319.599	43	287.300.756	43	287.300.756	358,33	94,43	72	671.060.719	62,61	40,67	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
24.05.		Facilitasi perencanaan pembangunan masyarakat	Jumlah desa yang terseleksi	Desa	47	1.500.000.000	24	511.308.377	15	256.317.000	5	256.317.000	0	29.323.000	0	111.604.565	0	154.686.745	13	245.777.999	13	245.777.999	260,00	95,89	37	757.086.376	78,72	50,47	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022

24.06.		Facilitasi dan Koordinasi Bidang Pengembangan Wilayah	Jumlah koordinasi	Koordinasi	115	1.850.000.000	19	215.900.064	7	173.614.000	7	173.614.000	4	10.793.292	10	57.609.244	12	98.499.065	20	164.593.250	20	164.593.250	285,71	94,89	39	380.493.314	33,91	20,57	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
33	Meningkatnya kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan	Program pengendalian perencanaan pembangunan daerah	Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	Persen	30	4.259.260.000	59,78	1.029.809.333	20	713.708.000	25	713.708.000	0	106.367.000	0	157.225.000	53,33	392.144.490	53,33	680.569.843	53	680.569.843	213,33	95,36	113	1.710.379.176	377,04	40,16	
33.01.		Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan evaluasi RKPD	Laporan	10	975.018.000	4	258.740.798	2	96.119.000	2	96.119.000	1	30.466.000	1	31.076.000	2	44.327.950	2	81.321.503	2	81.321.503	100,00	84,61	6	340.062.261	60,00	34,88	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
33.02.		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah laporan monitoring	Laporan	10	3.284.242.000	3	771.068.575	2	617.589.000	2	617.589.000	0	75.901.000	0	126.149.000	1	347.816.540	3	599.248.340	3	599.248.340	150,00	97,03	6	1.370.316.915	60,00	41,72	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
34		Program Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi pembangunan daerah	Laporan	20	3.408.575.000	8	882.651.390	4	256.210.000	4	256.210.000	1	60.190.189	2	192.830.789	3	221.042.189	3	227.492.189	3	227.492.189	75,00	88,79	11	1.110.143.579	55,00	32,57	
34.01.		Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	Laporan LKPJ	Laporan	5	1.796.425.000	2	448.654.875	1	167.450.000	1	167.450.000	0	42.344.000	1	161.117.800	1	161.117.800	1	161.117.800	1	161.117.800	100,00	96,22	3	609.772.675	60,00	33,94	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
34.02.		Penyusunan Perjanjian kinerja (Penja)	Jumlah dokumen Penja	Dokumen	10	500.000.000	4	220.619.715	2	88.760.000	2	88.760.000	1	17.846.189	1	31.712.989	2	59.924.389	2	66.374.389	2	66.374.389	100,00	74,78	6	286.994.104	60,00	57,40	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
34.03.		Pelaksanaan RAD-PPK	Laporan RAD-PPK	Laporan	5	1.112.150.000	2	213.376.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	2	213.376.800	40,00	19,19	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
15		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Yang Dilaksanakan dan Dimanfaatkan	Penelitian	3	1.450.000.000	1	1.980.913.856	2	599.761.000	1	599.761.000	1	-	1	131.202.000	1	250.702.510	2	507.561.647	2	507.561.647	200,00	84,63	3	2.488.475.503	100,00	171,62	
15.06.		Facilitasi dan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Laporan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Laporan	4	1.050.000.000	1	91.630.100	1	410.907.000	1	410.907.000	0	-	0	97.223.000	0	161.684.940	1	336.882.940	1	336.882.940	100,00	81,99	2	336.882.940	50,00	32,08	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
15.08.		Koordinasi dan Facilitasi Kelitbangan	Jumlah Koordinasi Kelitbangan	Koordinasi	12	200.000.000	8	86.466.700	12	188.854.000	12	188.854.000	0	-	5	33.979.000	9	89.017.570	12	170.678.707	12	170.678.707	100,00	90,38	20	170.678.707	166,67	85,34	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2020 secara keseluruhan relatif baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 15 indikator program yang ditargetkan dalam Renja tahun 2020, semuanya telah tercapai sesuai dengan target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja pada urusan perencanaan pembangunan dan urusan Penelitian dan Pengembangan tergolong baik.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Kinerja Akhir Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-3 (2019)			Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-4 (2020)		
					Target Kinerja Renja tahun 2019	Realisasi Kinerja Renja tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2019 (%)	Target Kinerja Renja tahun 2020	Realisasi Kinerja Renja tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020 (%)
Program pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	60	12	112	100	12	12	100
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	60	75	70	63,11	96,16	70	64,42	92,03
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang bersertifikasi	%	50	75	60	21,74	36,23	70	42,55	60,79

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Kinerja Akhir Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-3 (2019)			Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-4 (2020)		
					Target Kinerja Renja tahun 2019	Realisasi Kinerja Renja tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2019 (%)	Target Kinerja Renja tahun 2020	Realisasi Kinerja Renja tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020 (%)
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	Predikat/ Nilai	BB/75	A/80	BB/77	A/83,54	107,10	BB/79	A/85,96	100
Program pengembangan data/ informasi	Persentase tingkat keterisian data dalam system informasi pembangunan daerah	%	25	50	35	60	150	45	65	100
Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan dan dimanfaatkan	Penelitian	1	3	2	2	100	3	3	100

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Kinerja Akhir Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-3 (2019)			Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-4 (2020)		
					Target Kinerja Renja tahun 2019	Realisasi Kinerja Renja tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2019 (%)	Target Kinerja Renja tahun 2020	Realisasi Kinerja Renja tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020 (%)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	1	5	2	2	100	1	2	100
	Ketersediaan Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100
	Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	%	90	98	94	86,94	92,49	82	82,88	101,07
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Ekonomi	%	89,29	96	94	84	89,36	82	77,33	94,30

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Kinerja Akhir Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-3 (2019)			Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-4 (2020)		
					Target Kinerja Renja tahun 2019	Realisasi Kinerja Renja tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2019 (%)	Target Kinerja Renja tahun 2020	Realisasi Kinerja Renja tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020 (%)
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Sosial Budaya	%	72	88	78	93,41	116,76	84	83,81	99,77
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Konsistensi penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	89,29	96	93	90,80	96,60	95	92,21	97,06
Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	%	0	30	20	53	213,33	25	47,83	191,32
Program Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah	Laporan	2	20	4	3	75	4	3	75

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :
 - 1) Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi hasil pembangunan daerah
 - 2) Tingkat kemampuan SDM belum merata dalam penyusunan perencanaan pembangunan
 - 3) Masih kurangnya fasilitasi kebijakan dan penyelenggaraan koordinasi, kerjasama di bidang perekonomian dan sosial budaya, di bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup, dan di bidang pemerintahan
 - 4) Masih lemahnya integrasi data antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan perangkat daerah
 - 5) Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan perangkat daerah
 - 6) Belum terpenuhinya kebutuhan hasil penelitian dan pengembangan untuk menunjang kinerja pembangunan daerah.

- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :
- 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki tantangan untuk mendorong seluruh perangkat daerah dalam memecahkan isu strategis di Kabupaten Natuna, meliputi :
 - a. Kualitas Pembangunan Manusia belum optimal
 - b. Kesenjangan dan Keadilan Gender masih rendah
 - c. Pemerataan dan Mutu Pendidikan masih rendah
 - d. Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal
 - e. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur belum memadai
 - f. Pengembangan Wilayah Perbatasan Belum Optimal
 - g. Pengembangan Kemaritiman dan pariwisata belum optimal
 - h. Konektivitas Antar Pulau atau Kecamatan
 - i. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi
 - j. Peningkatan pendapatan masyarakat
 - k. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
 - l. Menciptakan lapangan kerja baru atau tenaga kerja terampil
 - 2) Tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan transparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan semakin meningkat, menjadi tantangan untuk terus memperbaiki proses dan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta mendorong perangkat daerah untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.
 - 3) Perkembangan peraturan dan kebijakan pembangunan nasional yang berubah-ubah menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga tercipta sinergitas pembangunan.
 - 4) Perubahan dinamika di tingkat nasional dan dunia yang terus berubah menuntut Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk menyusun dokumen perencanaan Kabupaten Natuna yang komprehensif dan mampu mengantisipasi perkembangan dinamika di tingkat nasional dan global.
- b. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:
- 1) Banyaknya dukungan dari berbagai pihak untuk menyusun dokumen perencanaan yang baik.

- 2) Tersedianya sarana sistem informasi yang berbasis elektronik dalam perencanaan.
- 3) Banyaknya bimbingan teknis dan pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur perencana.
- 4) Banyaknya lembaga penelitian atau penyedia jasa yang dapat membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara baik, sehingga dihasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat daerah maupun nasional.

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan perangkat daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan daerah.
- b) Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan di seluruh bidang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun 2022, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN 2020 - 2024, Visi Misi Presiden 2020 – 2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005 – 2025. RPJMN 2020 – 2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang diwujudkan ke dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan tahun 2020 – 2024 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ;
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
 - 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah,
 - 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
 - 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
 - 4) Memperkuat kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
 - 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :
 - 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - 6) Pengentasan kemiskinan; dan
 - 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
 4. Membangun kebudayaan dan Karakter Bangsa;
Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
 - 2) Memajukan kebudayaan;
 - 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
 - 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga dan
 - 5) Meningkatkan budaya literasi
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien dan
 - 5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :
- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,

- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi dan
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2022, antara lain meliputi:

- a. Kemiskinan;
- b. Lapangan Kerja;
- c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. Industri;

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM menjadi 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4-7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2 persen dan Papua 2,6-5,8 persen.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang, pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing melalui Pemulihan Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Serta Pengembangan Infrastruktur ”**.

Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2022 mempunyai prioritas yaitu:

1. Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan budaya
2. Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata
3. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang optimal

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan prioritas pembangunan provinsi tahun 2022 sehingga penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema **“Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing melalui Pemulihan Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Serta Pengembangan Infrastruktur ”**.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada pencapaian prioritas pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan. Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna adalah Meningkatkan pelayanan publik yang prima Perencanaan Pembangunan Daerah. Sedangkan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna adalah Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Perencanaan Pembangunan.

Tabel tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Tahun 2022

MISI 6 : Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	1. Indeks Perencanaan
			2. Indeks Inovasi Daerah

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2022
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Indikator Sasaran 2022	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2022
1. Meningkatnya pelayanan publik yang prima	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai LAKIP	%	96	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pengguna	Indekas	3.2
		Indeks Perencanaan	%	82	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	%	82
		Indeks Inovasi Daerah			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pejabaran RPJMD kedalam RKPD	%	96
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan	Penelitian	3

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026,
- b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026.

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2022 tertuang dalam Tabel berikut ini (Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023).

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta menghasilkan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pajabat struktural di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2022 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2022 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program, kegiatan subkegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2022.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan program, kegiatan sub kegiatan Renja tahun 2022 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Badan dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 guna memastikan pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Penelitian dan Pengembangan.

Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2022 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Ranai, 15 Juli 2021

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 49731030 200012 1 003

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN NATUNA**

NAMA PD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								121,086,934,500	123,581,020,500		
5.01.	PERENCANAAN								15,196,231,500	15,504,431,500		
5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				INDEKS KEPUASAN PENGGUNA	3 INDEKS			7,453,581,500	7,458,181,500		
5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Predikat/Nilai Akuntabilitas	89 Nilai/Predikat	441,957,800	446,557,800		
5.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen	2 Dokumen	394,065,800	398,665,800		
	Penyusunan Dokumen Renja dan Renstra						Jumlah Dokumen	2 Dokumen	394,065,800	398,665,800	Sedang Berjalan	
5.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan	3 Laporan	47,892,000	47,892,000		
	Laporan LAKIP, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan						Jumlah Laporan	3 Laporan	47,892,000	47,892,000	Sedang Berjalan	
5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	5,453,123,700	5,453,123,700		
5.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Pegawai	57 Orang	5,453,123,700	5,453,123,700		
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai/ASN						Jumlah Pegawai	57 Orang	5,453,123,700	5,453,123,700	Sedang Berjalan	
5.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Kehadiran Pegawai	95,00 %	86,500,000	86,500,000		

NAMA PD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	57 Stell	40,000,000	40,000,000		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya						Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	57 Stell	40,000,000	40,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	3 Orang	46,500,000	46,500,000		
	Bimtek Aparatur						Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	3 Orang	46,500,000	46,500,000	Sedang Berjalan	
5.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75,00 %	728,000,000	728,000,000		
5.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	34,000,000	34,000,000		
	Pengadaan Kursi Kerja						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	12,000,000	12,000,000	Sedang Berjalan	
	Pengadaan Lemari Arsip						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	2,000,000	2,000,000	Sedang Berjalan	
	Pengadaan Meja Kerja						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	20,000,000	20,000,000	Sedang Berjalan	

NAMA PD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	12,000,000	12,000,000		
	Penyediaan Alat dan Bahan Pembersih Kantor						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	12,000,000	12,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,220 Kotak	60,000,000	60,000,000		
	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,220 Kotak	60,000,000	60,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	80,000 Lembar	40,000,000	40,000,000		
	Penyediaan Cetak dan Penggandaan Kantor						Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	80,000 Lembar	40,000,000	40,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	288 Buah	12,000,000	12,000,000		
	Penyediaan Koran, Majalah dan Peraturan Perundang- undangan						Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	288 Buah	12,000,000	12,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	70,000,000	70,000,000		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	70,000,000	70,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93 Kali	492,800,000	492,800,000		

NAMA PD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi						Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93 Kali	492,800,000	492,800,000	Sedang Berjalan	
5.01.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Arsip Dinamis yang disusun	40 Dokumen	7,200,000	7,200,000		
	Pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis						Jumlah Dokumen Arsip Dinamis yang disusun	40 Dokumen	7,200,000	7,200,000	Sedang Berjalan	
5.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	75,00 %	40,000,000	40,000,000		
5.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1 Unit	40,000,000	40,000,000		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua						Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1 Unit	40,000,000	40,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Peningkatan Kepuasan Pengguna	80,00 %	552,000,000	552,000,000		
5.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Penyediaan Materai Kantor	600 Lembar	6,000,000	6,000,000		
	Penyediaan Materai Kantor						Jumlah Penyediaan Materai Kantor	600 Lembar	6,000,000	6,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	36,000,000	36,000,000		
	Penyediaan Air dan Listrik						Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	36,000,000	36,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Tenaga Honorer/PTT	17 Orang	510,000,000	510,000,000		
	Pembayaran Gaji Tenaga Honorer/PTT						Jumlah Tenaga Honorer/PTT	17 Orang	510,000,000	510,000,000	Sedang Berjalan	

NAMA PD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75.00 %	152,000,000	152,000,000		
5.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	4 Unit	60,000,000	60,000,000		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor						Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	4 Unit	60,000,000	60,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Gedung	80,000,000	80,000,000		
	Pemeliharaan Gedung Kantor						Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Gedung	80,000,000	80,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	12,000,000	12,000,000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	12,000,000	12,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				PERSENTASE REKOMENDASI HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIAKOMODIR	82,00 %			3,455,250,000	3,755,250,000		
5.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2,305,250,000	2,505,250,000		
5.01.02.2.01.03.	Pelaksanaan Konsultasi Publik						Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Kali	120,000,000	120,000,000		

NAMA PD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2023						Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Kali	120,000,000	120,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.02.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD						Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD	1 Kali	250,000,000	250,000,000		
	Pelaksanaan Forum SKPD						Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD	1 Kali	250,000,000	250,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.02.2.01.05.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Kali	835,250,000	935,250,000		
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Musrenbang RPJMD						Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Kali	835,250,000	935,250,000	Sedang Berjalan	
5.01.02.2.01.06.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan						Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang Kecamatan	17 Kecamatan	250,000,000	250,000,000		
	Koordinasi Musrenbang Kecamatan						Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang Kecamatan	17 Kecamatan	250,000,000	250,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.02.2.01.07.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen RKPD Yang Ditetapkan Dengan PERKADA	2 Perbup	850,000,000	950,000,000		
	Perbup RKPD dan RKPD Perubahan						Jumlah Dokumen RKPD Yang Ditetapkan Dengan PERKADA	2 Perbup	850,000,000	950,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	90,00 %	600,000,000	700,000,000		

NAMA PD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.02.2.02.01.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	500,000,000	600,000,000		
	Penyusunan Analisis Data, SIPD dan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah						Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	500,000,000	600,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.02.2.02.03.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000		
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah						Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	25,00 %	550,000,000	550,000,000		
5.01.02.2.03.03.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan	550,000,000	550,000,000		
	Laporan Monev, LKPJ, Penja dan Evaluasi RKPD						Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan	550,000,000	550,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				PENJABARAN PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD	96,00 %			4,287,400,000	4,291,000,000		

NAMA PD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	92,00 %	1,650,000,000	1,650,000,000		
5.01.03.2.01.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Kali	200,000,000	200,000,000		
	Koordinasi Subbidang Pemberdayaan Masyarakat						Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Kali	200,000,000	200,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.03.2.01.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000		
	Penyusunan Rat Taskin						Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.03.2.01.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	150,000,000	150,000,000		

NAMA PD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Monev Taskin						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.03.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	12 Kali	200,000,000	200,000,000		
	Koordinasi Bidang Pemerintahan						Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	12 Kali	200,000,000	200,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.03.2.01.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Kali	200,000,000	200,000,000		
	Koordinasi Subbidang Pendidikan dan Kesehatan						Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Kali	200,000,000	200,000,000	Sedang Berjalan	

NAMA PD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.03.2.01.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen	250,000,000	250,000,000		
	Penyusunan Rad Sdg's. Penyusunan Rpkd, Rat dan LP2KD Taskin						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen	250,000,000	250,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.03.2.01.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						Jumlah monitoring	11 Kali	300,000,000	300,000,000		
	Monev Stunting (Aksi 1 Sampai 8) dan Monev KKS						Jumlah monitoring	11 Kali	300,000,000	300,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.03.2.01.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						Jumlah Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Kali	200,000,000	200,000,000		
	Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia						Jumlah Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Kali	200,000,000	200,000,000	Sedang Berjalan	

NAMA PD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	92,00 %	1,600,000,000	1,600,000,000		
5.01.03.2.02.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						Jumlah Koordinasi	4 Kali	200,000,000	200,000,000		
	Forum OPD Bidang Perekonomian						Jumlah Koordinasi	4 Kali	200,000,000	200,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.03.2.02.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000		
	Penyusunan Dokumen Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah (PELD)						Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.03.2.02.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						Jumlah Laporan	1 Laporan	200,000,000	200,000,000		
	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						Jumlah Laporan	1 Laporan	200,000,000	200,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.03.2.02.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						Jumlah Koordinasi	4 Kali	200,000,000	200,000,000		
	Forum Ekonomi Lokal Daerah						Jumlah Koordinasi	4 Kali	200,000,000	200,000,000	Sedang Berjalan	

NAMA PD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.03.2.02.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						Jumlah Koordinasi	4 Kali	200,000,000	200,000,000		
	Forum OPD Bidang SDA						Jumlah Koordinasi	4 Kali	200,000,000	200,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.03.2.02.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.03.2.02.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						Jumlah Laporan	1 Laporan	200,000,000	200,000,000		
	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						Jumlah Laporan	1 Laporan	200,000,000	200,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.03.2.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						Jumlah Koordinasi	4 Kali	200,000,000	200,000,000		
	Forum Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah						Jumlah Koordinasi	4 Kali	200,000,000	200,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	92,00 %	1,037,400,000	1,041,000,000		
5.01.03.2.03.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						Jumlah Koordinasi	4 Kali	197,400,000	197,400,000		

NAMA PD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJMD, RPJPD dan RKPD)						Jumlah Koordinasi	4 Kali	197,400,000	197,400,000	Sedang Berjalan	
5.01.03.2.03.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						Jumlah Dokumen Perencanaan yang diasistensi	2 Dokumen	120,000,000	120,000,000		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						Jumlah Dokumen Perencanaan yang diasistensi	2 Dokumen	120,000,000	120,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.03.2.03.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur	1 Laporan	120,000,000	120,000,000		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur	1 Laporan	120,000,000	120,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.03.2.03.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						Jumlah Koordinasi	20 Kali	120,000,000	120,000,000		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinertigitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						Jumlah Koordinasi	20 Kali	120,000,000	120,000,000	Baru	
5.01.03.2.03.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						Jumlah Koordinasi Bidang Kewilayahan	20 Koordinasi	120,000,000	123,600,000		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						Jumlah Koordinasi Bidang Kewilayahan	20 Koordinasi	120,000,000	123,600,000	Baru	

NAMA PD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.03.2.03.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						Jumlah Dokumen Perencanaan yang diasistensi Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	120,000,000	120,000,000		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						Jumlah Dokumen Perencanaan yang diasistensi Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	120,000,000	120,000,000	Baru	
5.01.03.2.03.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kewilayahan	2 Laporan	120,000,000	120,000,000		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kewilayahan	2 Laporan	120,000,000	120,000,000	Sedang Berjalan	
5.01.03.2.03.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Bidang Kewilayahan	10 Kali	120,000,000	120,000,000		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah						Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Bidang Kewilayahan	10 Kali	120,000,000	120,000,000	Sedang Berjalan	
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								2,101,902,000	2,150,000,000		
5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				JUMLAH PENELITIAN YANG DIMANFAATKAN	3 PENELITIAN			2,101,902,000	2,150,000,000		
5.05.02.2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	100,00 %	400,600,800	400,000,000		

NAMA PD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.05.02.2.01.11.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa						Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang dikembangkan	1 Badan Usaha	200,300,400	200,000,000		
	Pengembangan Bumdes						Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang dikembangkan	1 Badan Usaha	200,300,400	200,000,000	Sedang Berjalan	
5.05.02.2.01.12.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						Jumlah laporan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1 Laporan	100,200,300	100,000,000		
	Pengelolaan Data dan Kelitbangan dan Peraturan						Jumlah laporan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1 Laporan	100,200,300	100,000,000	Sedang Berjalan	
5.05.02.2.01.13.	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan						Jumlah dokumen Perumusan Rekomendasi dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1 Dokumen	100,100,100	100,000,000		
	Perumusan Rekomendasi dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan						Jumlah dokumen Perumusan Rekomendasi dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1 Dokumen	100,100,100	100,000,000	Sedang Berjalan	
5.05.02.2.02.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100,00 %	300,000,000	300,000,000		
5.05.02.2.02.05.	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata						Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000		
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata						Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	Sedang Berjalan	

NAMA PD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.05.02.2.03.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100,00 %	900,750,600	850.000.000		
5.05.02.2.03.02.	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan						Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	300,200,100	250.000.000		
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan						Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	300,200,100	250.000.000	Sedang Berjalan	
5.05.02.2.03.04.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan						Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	300,300,300	300.000.000		
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan						Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	300,300,300	300.000.000	Sedang Berjalan	
5.05.02.2.03.05.	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan						Jumlah Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	300,250,200	300.000.000		
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan						Jumlah Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	300,250,200	300.000.000	Sedang Berjalan	
5.05.02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100,00 %	500,550,600	600.000.000		
5.05.02.2.04.01.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi						Jumlah Pengembangan Inovasi Daerah	1 Inovasi	150,200,250	200.000.000		

NAMA PD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NAMA PD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Pengembangan Inovasi Daerah						Jumlah Pengembangan Inovasi Daerah	1 Inovasi	150,200,250	200,000,000	Sedang Berjalan	
5.05.02.2.04.02.	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi						Jumlah Uji Coba Hasil Inovasi Daerah	1 Inovasi	150,150,150	150,000,000		
	Pelaksanaan Uji Coba Hasil Inovasi						Jumlah Uji Coba Hasil Inovasi Daerah	1 Inovasi	150,150,150	150,000,000	Sedang Berjalan	
5.05.02.2.04.03.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat inovatif						Jumlah Inovasi Daerah	10 Inovasi	200,200,200	250,000,000		
	Pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah						Jumlah Inovasi Daerah	10 Inovasi	200,200,200	250,000,000	Sedang Berjalan	
JUMLAH									121,086,934,500	123,581,020,500		

Ranai, 15 Juli 2021

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE

NIP. 197510302000121003